

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori *Financial Behavior***

*Financial Behavior* adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan aplikasi keuangan. Menurut Ricciardi (2000), *financial behavior* adalah suatu disiplin ilmu yang di dalamnya melekat interaksi berbagai disiplin ilmu dan secara terus menerus berintegrasi sehingga pembahasannya tidak dilakukan isolasi. Seseorang yang ingin mempelajari perilaku keuangan harus memiliki pengertian mengenai aspek psikologi, sosiologi, dan keuangan. Menurut Hilgert, Holgart dan Beverly (2003) bahwa perilaku keuangan seseorang akan tampak dari seberapa bagus seseorang mengelola tabungan dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Sedangkan tabungan terkait memiliki tabungan regular atau tidak, memiliki dana darurat atau tidak serta masih banyak lagi lainnya. Pengeluaran lainnya akan tampak seperti mampu membeli rumah, memiliki tujuan dan lain-lainnya.

Nabaan dan Sadalia (2013) menjelaskan *financial behavior* berhubungan dengan bagaimana seseorang memperlakukan mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan ada padanya. Individu yang memiliki *financial behavior* yang bertanggung jawab cenderung efektif dalam penggunaan uang yang dimilikinya seperti membuat anggaran, menghemat uang, dan mengontrol belanja, investasi, serta membayar kewajiban tepat waktu. Menurut Ida dan Dwinta (2014) *financial behavior* berhubungan dengan tanggung jawab keuangan seseorang terkait dengan cara pengelolaan keuangan. Tanggung jawab keuangan merupakan proses pengelolaan uang dan fase yang dilakukan secara produktif. Pengelolaan uang adalah proses menguasai dan menggunakan aset keuangan.

#### **2.2 Inklusi Keuangan**

Inklusi keuangan adalah menyediakan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran pada tingkat harga yang mampu dibayar oleh seluruh pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi berpendapatan rendah (Anwar dan Amri 2017). Bank Indonesia (2014) mendefinisikan keuangan inklusif (*financial inclusion*) sebagai seluruh upaya yang bertujuan

meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Indikator yang dapat dijadikan ukuran dari keuangan yang inklusif sebuah negara adalah ketersediaan atau akses untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga, penggunaan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan), kualitas untuk mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutan pelanggan, dan kesejahteraan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

Menurut Sarma (2012) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi. Tidak jauh berbeda dengan definisi Sarma, Gerdeva dan Rhyne (2011) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah kondisi dimana semua orang dapat mengakses jasa keuangan berkualitas, tersedia dengan harga terjangkau, dengan cara yang nyaman dan memuaskan. Sedangkan Demirguc-Kunt dan Klapper (2012) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai penyediaan akses jasa keuangan yang luas tanpa hambatan harga maupun non harga dalam penggunaannya.

Tujuan inklusi keuangan tersebut diatas dapat tercapai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang telah disusun oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), kebijakan keuangan inklusif mencakup pilar dan fondasi SNKI yang didukung koordinasi antar kementerian/lembaga atau instansi terkait, serta dilengkapi dengan aksi keuangan inklusif. Berikut adalah pilar dan fondasi dari SNKI :

a. Pilar edukasi keuangan

Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

b. Pilar hak properti masyarakat

Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal.

c. Pilar fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan

Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

d. Pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah

Layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai.

e. Pilar perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

f. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.

### Pengukuran Inklusi Keuangan

Menurut OJK (2016) menyebutkan ada beberapa indikator inklusi keuangan yaitu:

1. Ketersediaan / akses: mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
2. Penggunaan: mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
3. Kualitas: mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.
4. Kesejahteraan: mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

### ***2.3 Financial Technology***

*Financial technology* adalah salah satu implementasi penggunaan teknologi informasi yang berhubungan dengan keuangan (Alimirruchi 2017). Menurut National Digital Dublin (2014) mendefinisikan *Financial technology* adalah sebuah inovasi dalam jasa keuangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Sedangkan menurut *International Trade Administration (2016)*, *Financial technology* merupakan sebuah “revolusi” atas penggabungan jasa keuangan dengan teknologi informasi yang telah meningkatkan kualitas layanan keuangan dan menciptakan stabilitas keuangan. *Financial technology* menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan (Arner,et al.,2015). Secara spesifik, *Financial technology* didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah intermediasi keuangan (Arner,et al.,2017).

Bank Indonesia (2016) mengklasifikasikan *Financial technology* ke dalam empat kategori, yaitu sebagai berikut :

a. *Crowdfunding and peer to peer (P2P) lending*

Klasifikasi ini berdasarkan fungsi dari platform yaitu sebagai sarana pertemuan pencari modal dan investor di bidang pinjaman. Platform ini menggunakan teknologi informasi terutama internet untuk menyediakan layanan pinjam meminjam uang dengan mudah. Pemberi modal hanya melakukan penyediaan modal dan peminjam melakukan proses peminjaman melalui platform yang disediakan secara online. Kategori *financial technology* ini termasuk kepada layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk menjamin keamanan penggunaan layanan jasa *crowdfunding dan P2P lending* di Indonesia, pada tahun 2016 OJK mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. *Market aggregator*

Kategori ini merupakan media yang mengumpulkan dan mengoleksi data finansial dari berbagai penyedia data untuk disajikan kepada pengguna. Data finansial ini kemudian dapat digunakan untuk memudahkan pengguna dalam membandingkan dan memilih produk keuangan terbaik.

c. *Risk and investment management*

Kategori berikut ini merupakan klasifikasi untuk layanan *financial technology* yang berfungsi sebagai perencana keuangan dalam bentuk digital. Sehingga, pengguna dapat melakukan perencanaan dan mengetahui kondisi keuangan pada setiap saat dan seluruh keadaan.

d. *Payment, settlement, and clearing*

Layanan *financial technology* pada kategori ini berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran melalui online secara cepat. *Financial technology* ini berada dalam pengawasan Bank Indonesia. Pada tahun 2016, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Peraturan ini bertujuan untuk tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, termasuk standar, dan praktik internasional.

## 2.4 Literasi Keuangan

OJK (2016) mendefinisikan literasi sebagai serangkaian pengetahuan (*knowledge*), kepercayaan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*), yang mempengaruhi sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2016)* mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (*financial well being*) individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi.

Pada penelitian Kharchenko (2011) berjudul Literasi Keuangan di Negara Ukraina, literasi keuangan dapat diringkas sebagai keterampilan numerik yang diperlukan dan pemahaman konsep ekonomi dasar yang dibutuhkan untuk tabungan dan pengambilan keputusan dalam pinjaman. Menurut Warsono (2010), setiap orang perlu untuk mencapai kemerdekaan keuangan,

pengetahuan dan implementasi dalam melakukan praktik keuangan pribadi yang sehat dan ideal. Literasi (kemelekkan) keuangan diartikan dengan sejauh mana pengetahuan dan implementasi seseorang dalam mengelola keuangannya.

### Pengukuran Tingkat Literasi Keuangan

Memahami dan menerapkan konsep dasar ekonomi secara tepat tercermin dalam perilaku seseorang dalam mengelola keuangan. Dalam literasi keuangan ada beberapa indikator. Terdapat beberapa elemen kunci dari kemampuan dan pengetahuan literasi keuangan yang biasanya disebutkan dalam literatur, yaitu menurut Latifiana (2010).

#### 1. Pengetahuan Dasar Pengelolaan Keuangan

Pengetahuan dasar pengelolaan keuangan merupakan pengetahuan terkait dasar-dasar prinsip pengelolaan keuangan yang dimiliki seseorang untuk nantinya digunakan sebagai acuan pengelolaan keuangan pribadi, keluarga dan usaha yang dimilikinya (Chen dan Volpe, 1998). Hasil studi yang dilakukan oleh Chen dan Volpe (1998) menyatakan bahwa sebagian besar dari mahasiswa harus meningkatkan pengetahuan keuangan pribadi, karena pengetahuan mengenai keuangan akan sangat berpengaruh terhadap keputusan keuangan yang akan dibuat kemudian.

#### 2. Pengelolaan Kredit

Pengelolaan kredit dikenal juga sebagai manajemen kredit. Proses tersebut merupakan proses dimana pemilik kredit atau debitur mengatur kredit yang dimiliki agar digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan awal melakukan kredit dimulai sejak kredit tersebut diajukan hingga kredit tersebut dinyatakan lunas (Sevim, Temizel dan Sayilir, 2012). Hasil studi yang dilakukan Fatoki (2014) menyatakan bahwa usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Afrika Selatan memahami adanya jasa peminjaman yang dimiliki bank.

#### 3. Pengelolaan Tabungan dan Investasi

Pengelolaan tabungan adalah sebuah proses yang membantu penempatan dana surplus yang dimiliki seseorang dengan tujuan untuk kemudahan akses likuiditas, perencanaan keuangan dan keamanan. Sedangkan pengelolaan investasi adalah proses yang membantu perumusan kebijakan dan tujuan sekaligus pengawasan dalam penanaman modal untuk memperoleh keuntungan (www.ojk.go.id; 2015). Chen dan Volpe (1998) menyatakan bahwa lemahnya

pengetahuan keuangan dapat menimbulkan kesalahan persepsi dan kesalahan dalam mengambil keputusan dalam penyimpanan, peminjaman dan investasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fatoki (2014) menyatakan bahwa mayoritas dari UMKM di Afrika Selatan memahami dasar-dasar bisnis dan keuangan seperti tabungan, pinjaman, investasi, kolateral, asuransi dan suku bunga.

#### 4. Manajemen Risiko

Risiko adalah sebuah kemungkinan kejadian atau peristiwa yang merugikan perusahaan atau bisnis, dimana kejadian tersebut tidak dapat diprediksi. Bramantyo Djohanputro (2008), menyatakan bahwa manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. Tujuan dari manajemen risiko adalah menghindari atau meminimalisir risiko-risiko yang timbul atas sebuah keputusan yang telah dibuat oleh pengelola perusahaan.

### 2.5 Modal Sosial

Modal sosial adalah pengetahuan individu (waktu, tenaga, dan konsumsi) yang dibuat dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan orang lain (Oxoby, 2009). Felicio et.al. (2014) juga menjelaskan bahwa modal sosial adalah tentang solidaritas, kepercayaan diri, dan memfasilitasi dalam menjalankan suatu bisnis, yang merupakan factor yang berasal dari hubungan social yang melibatkan keluarga, teman, rekan kerja dan lain- lain. Berdasarkan pemaparan dari Oxoby (2009) dan Felicio et.al (2014) dapat disimpulkan bahwa modal social adalah seseorang atau kelompok yang mempercayai suatu pengetahuan, pemahaman, norma aturan dan harapan terkait peran mengikat dengan hubungan interpersonal dan keanggotaan, serta penghubung jaringan social yang diimplementasikan dalam suatu aksi kolektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penumbuhan dan pertumbuhan modal social yang termasuk dalam kategori ini (Harahap 2016):

1. Mobilitas Penduduk
2. Keberagaman Penduduk
3. Kehidupan Ekonomi
4. Tingkat Partisipasi Pendidikan
5. Tingkat Saling Percaya.

Ada tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norma*) dan jaringan-jaringan (*networks*). (Balau, 2016)

a. Kepercayaan

Sebagaimana dijelaskan Fukuyama (1995), kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial merupakan penerapan terhadap pemahaman ini. Cox (1995) kemudian mencatat bahwa dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, aturan-aturan sosial cenderung bersifat positif; hubungan-hubungan juga bersifat kerjasama.

b. Norma

Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama (Putnam, 1993; Fukuyama, 1995). Norma-norma dapat merupakan pra-kondisi maupun produk dari kepercayaan sosial.

c. Jaringan

Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia (Putnam, 1993). Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Orang mengetahui dan bertemu dengan orang lain. Mereka kemudian membangun inter-relasi yang kental, baik bersifat formal maupun informal (Onyx, 1996). Putnam (1995) berargumen bahwa jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta manfaat-manfaat dari partisipasinya itu.

## **2.6 Pengembangan Hipotesis**

### **1. Pengaruh *Financial Technology* Terhadap Inklusi Keuangan**

*Financial technology* adalah salah satu implementasi penggunaan teknologi informasi yang berhubungan dengan keuangan (Alimirruchi 2017). Menurut definisi di atas kehadiran fintech

sebenarnya memberi pengaruh positif bagi perekonomian secara makro. Fintech bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok yang belum terjangkau oleh perbankan. Sedangkan perbankan sendiri tidak dapat menjangkau fintech karena terbentur regulasi. Ini memncerminkan masih terbukanya peluang pasar untuk perkembangan fintech bagi pengusaha-pengusaha non perbankan. Sri Mulyani dalam pidatonya di ICE BSD, menilai perusahaan financial technology dapat memberikan kemudahan akses keuangan bagi semua lapisan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrina Hutabarat tahun 2018 menjelaskan *financial technology* memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan ,semakin baik penggunaan *financial technology* akan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.

## **2. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan**

Literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan keterampilan yang dimiliki dalam hidupnya, sehingga literasi mencakup kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis (Soetiono dan Setiawan, 2018).

Penelitian Saputra dan Dewi (2017) mengatakan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perceived pinjaman bank, literasi keuangan dan akses ke kredit formal. Menurut Sohilauw (2018) dalam risetnya menemukan bahwa background pendidikan, penghasilan dan faktor demografis sangat berpengaruh terhadap inklusi keuangan, karena mereka paham akan manfaat yang akan diterima. Menurut Sardiana (2018) sistem keuangan yang inklusif berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi perbedaan pendapatan. Pengembangan sektor keuangan berpengaruh positif pada GDP per kapita melalui alokasi dana yang efisien dan meningkatkan output per pekerja serta dapat mengundang masuknya modal asing sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara literasi keuangan terhadap Inklusi Keuangan.

## **3. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Inklusi Keuangan**

Menurut Saputra dan Dewi (2017) lebih lanjut mengemukakan bahwa modal sosial berperan penting dalam meningkatkan berbagai sumber daya termasuk pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh masyarakat sebagai driver dari literasi keuangan. Penelitian Salam Dz (2017) mengemukakan bahwa modal manusia merupakan faktor kunci bagi perkembangan keuangan yang pada gilirannya mengarah pada penciptaan modal manusia lebih jauh. Hal ini juga didukung dengan pernyataan Marla & Dewi (2017) yaitu dengan demikian, akan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara perlahan di masyarakat, modal sosial sebagai suatu dimensi yang dibangun berdasarkan nilai, kultur, persepsi, institusi serta mekanisme Modal Sosial Inklusi Keuangan dalam kegiatan positif sebagai sarana pemberdayaan terhadap pandangan masyarakat, sehingga terdapat hubungan literasi keuangan dan modal sosial terhadap Inklusi keuangan pada kaum muda.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Delyana Rahmawany Pulungan dan Ameliyani Ndruru (2019)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Modal Sosial Terhadap Inklusi Keuangan Mahasiswa	Literasi Keuangan, Modal Sosial dan Inklusi Keuangan	Kuantitatif	1.Literasi Keuangan dan modal social yang diterima oleh mahasiswa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencapaian inklusi keuangan mahasiswa.  Mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam mengelola keuangan pribadinya dan

					<p>dengan adanya dukungan lingkungan yang baik disekitar terutama kampus dan keluarga akan membantu mahasiswa untuk menyerap seluruh perilaku keuangan yang positif, mahasiswa mampu mengakses seluruh produk dan layanan keuangan dengan baik untuk mengelola keuangan pribadinya atau bahkan mampu menularkan pola perilaku keuangan yang positif bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya sehingga dinyatakan pencapaian inklusi keuangan pada mahasiswa berhasil.</p>
2.	Pipit Buana Sari dan Handriyani Dwillita	Prospek Financial Technology di Sumatera Utara	Financial technology, Literasi Keuangan dan Inklusi	Kuantitatif	<p>Fintech dapat berkembang pesat di Sumatera Utara. Inklusi keuangan dan literasi berkembang baik serta</p>

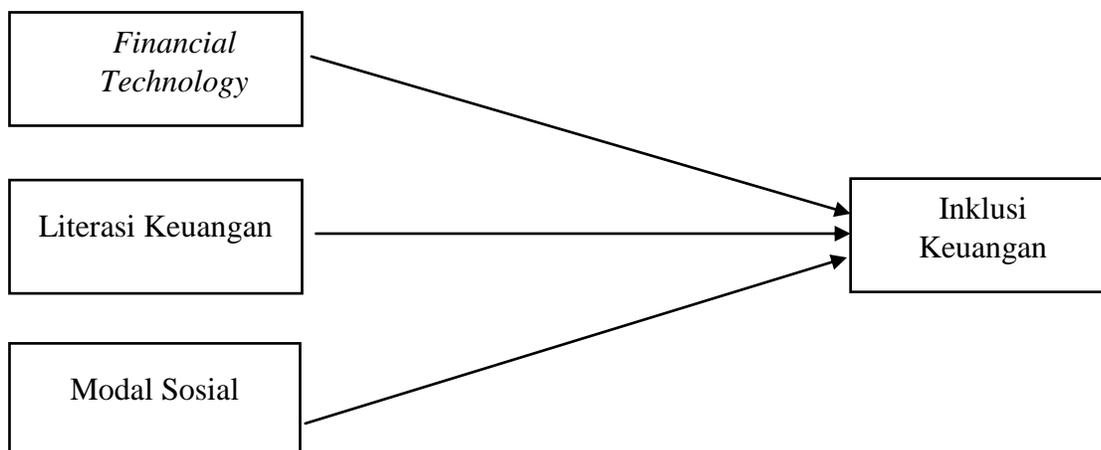
	(2018)	dilihat dari sisi literasi keuangan ,inklusi keuangan dan kemiskinan.	Keuangan		Elektronika dan pemanfaatan digital teknologi sudah berjalan cukup baik,diantaranya dilihat dari pembayaran gaji pegawai negeri maupun swasta dari tuna menjadi non tunai.
3.	Rachmat Simabara Saputra dan Andrieta Shintia Dewi (2017)	Peran Modal Sosial sebagai Mediator Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada Kaum Muda Di Indonesia (Studi Kasus pada Komunitas Investor	Literasi Keuangan, Modal Sosial dan Inklusi Keaungan	Kuantitatif	1.Penelitian ini berhasil menemukan bukti bahwa terdapat hubungan yang signifikansi antara literasi keuangan dan inklusi keuangan.  Juga terdapat peran modal social yang signifikansi sebgai mediator antara literasi keuangan dan inklusi keuangan. Selain itu juga penelitian mendapat temuan bahwa dampak literasi keuangan pada inklusi keuangan akan meningkatkan

		Saham Pemula)			jika terdapat peran modal social, hal ini berarti efek langsung literasi keuangan pada inklusi keuangan dapat dikatakan rendah.
4.	Geogre Okello Candiya Bogomin, John C, Menune, Joseph Ntayi Mpeera, and Charles Malinga Akol (2017)	Financial Inclusion in rural Uganda: The role of social capital and generational values	Inklusi Keuangan dan Modal Sosial	Kuantitatif	<p>1. Variasi dalam modal social komponen lintas generasi secara signifikan dan positif mempengaruhi inklusi keuangan orang miskin dipedesaan Uganda.</p> <p>2. Variasi dalam modal social lintas generasi dapat menyebabkan efek dalam inklusi keuangan kaum miskin, terutama di pedesaan Uganda.</p>
5.	Ari Nugrogo dan Evi Yulia Purwanti	Determinasi Inklusi Keuangan di Indonesia (Global	Inklusi Keuangan	Kuantitatif	<p>1. Karakteristik individu menunjukkan bahwa seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan usia</p>

	(2017)	Findex 2014)			<p>secara signifikan mempengaruhi kepemilikan dan rekening tabungan di lembaga keuangan formal.</p> <p>2. Gender tidak memiliki pengaruh yang signifikan.</p>
--	--------	-----------------	--	--	---

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini meliputi, Financial Technology, Literasi Keuangan dan Modal Sosial sebagai variable independent, sedangkan Inklusi Keuangan sebagai variable Dependent.



## 2.9 Hipotesis

Hipotesis Umum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Diduga *Financial technology* berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan mahasiswa IIB Darmajaya.

H<sub>2</sub> : Diduga Literasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan mahasiswa IIB Darmajaya.

H<sub>3</sub> : Diduga Modal Sosial berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan mahasiswa IIB Darmajaya.